

ekonomi yang masih di bawah kapasitas, serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai sasarannya dan *imported inflation* yang terkendali. Inflasi *volatile food* juga diperkirakan tetap terkendali didukung sinergi erat Bank Indonesia dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dalam peningkatan produktivitas pangan, kerjasama antar daerah, dan intervensi harga melalui operasi pasar dan pasar murah bekerjasama dengan mitra distributor Pemerintah termasuk BUMD/Perumda, koperasi, dan UMKM.

7.1.3. PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI BALI 2026

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali pada 2026 diperkirakan menguat dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di atas proyeksi PDB Nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan tetap tinggi dan berada pada kisaran 5,4– 6,2% (yoy). Perkonomian Bali diproyeksikan di atas proyeksi PDB Nasional sebesar 4,9 – 5,7% (yoy). Pertumbuhan yang relatif tinggi ini terutama ditopang oleh meningkatkan kinerja LU Pertanian, LU Konstruksi, LU Perdagangan serta tetap kuatnya pertumbuhan LU Akmamin dan Transportasi. LU Pertanian diperkirakan meningkat didukung cuaca yang lebih kondusif dan berlanjutnya program swasembada pangan, serta meningkatnya kinerja subsektor peternakan terutama dalam rangka pemenuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). LU Konstruksi didorong oleh proyek strategis multitalahun, seperti pembangunan berbagai klinik kesehatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, pengembangan fasilitas di KEK Kura-Kura, dimulainya proyek PSN PPN Pengambengan, serta tingginya proyek konstruksi pariwisata. LU Perdagangan diproyeksikan meningkat seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat yang didukung berbagai stimulus pemerintah, serta meluasnya program prioritas pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kinerja LU terkait pariwisata yakni Akomodasi, Makan, dan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan tetap menjadi motor pertumbuhan didukung oleh kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara meskipun

pertumbuhannya tidak setinggi tahun sebelumnya.

Berbagai program sinergi terus dilakukan untuk mendorong transformasi ekonomi Bali dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui Kebijakan Transformasi Perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali, enam sektor unggulan menjadi fokus pengembangan: sektor pertanian; sektor kelautan dan perikanan; sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali; sektor IKM, UMKM, dan Koperasi; sektor ekonomi kreatif dan digital; dan sektor pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Implementasi Pergub 99/2018 mengenai Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali terus dioptimalkan. Selain itu, kolaborasi peningkatan produktivitas sektor pertanian juga terus dilakukan melalui penguatan implementasi regulasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan, penggunaan bibit unggul, dan *smart farming*. Di sektor pariwisata, upaya peningkatan pariwisata berkualitas terus dilakukan dengan meningkatkan daya saing destinasi dengan menonjolkan keunikan destinasi sehingga mampu memberikan pengalaman wisata bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan kebudayaan lokal. Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan global, tercermin dari berbagai penghargaan internasional antara lain 'World's Best Cultural Destination 2025 (Tripadvisor, Peringkat 1)', 'World's Best Honeymoon Destination (Tripadvisor, Peringkat 2)' dan 'Top Island Destination 2025 (DestinAsian Readers' Choice Awards, Peringkat 1)'.

SISI PENGELUARAN

Konsumsi RT diperkirakan meningkat pada 2026. Hal ini seiring dengan tetap kuatnya kinerja pariwisata Bali yang didorong tingginya kunjungan wisatawan. Kenaikan UMR dan gaji, serta berbagai insentif fiskal turut memperkuat daya beli masyarakat. Optimisme konsumen juga terjaga, tecermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia hingga Triwulan I 2026 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), Indeks Ekspektasi Kondisi Kegiatan Usaha, serta Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan di Bali tetap tinggi (di atas 100). Berbagai stimulus pemerintah, seperti diskon

angkutan udara, insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata, serta pelonggaran kebijakan moneter, turut meningkatkan daya beli masyarakat terutama di Bali yang perekonomiannya didominasi sektor pariwisata. Inflasi IHK yang diperkirakan terkendali dalam sasaran pada 2026 juga menjadi faktor pendukung peningkatan konsumsi rumah tangga.

Konsumsi Pemerintah pada 2026 diperkirakan meningkat. Peningkatan konsumsi pemerintah didorong oleh pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah seperti MBG, KDKMP, dan sekolah rakyat serta pengangkatan pegawai P3K seiring penambahan Dapur SPPG. Pagu belanja APBN dan APBD 2026 diperkirakan meningkat, kenaikannya berpotensi tertahan oleh penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Optimalisasi pengumpulan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) juga diperkirakan mendorong kinerja konsumsi pemerintah pada 2026.

Investasi pada 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Prakiraan kinerja investasi yang menguat didukung oleh tetap kuatnya investasi terutama di sektor tersier terkait dengan pariwisata, berlanjutnya proyek-proyek strategis multitalun, serta penambahan proyek strategis baru pada 2026 diantaranya PSN PPN Pengambengan dan Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik. Target realisasi PMDN dan PMA Bali pada 2026 mencapai 47,93 triliun rupiah, meningkat 11,93% dibanding realisasi 2025 sebesar 42,82 triliun rupiah. Namun demikian, dominasi investasi di sektor tersier, seperti pembangunan akomodasi pariwisata turut menjadi tantangan ke depan mengingat keterbatasan lahan. Oleh karena itu, penguatan investasi sektor primer dan sektor sekunder, termasuk hilirisasi perlu terus didorong guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang.

Ekspor luar negeri Bali pada 2026 diproyeksikan tetap tumbuh meski melambat. Perlambatan dipengaruhi oleh moderasi ekspor jasa luar negeri seiring pertumbuhan kunjungan wisatawan asing yang tidak setinggi periode sebelumnya di tengah kunjungan wisatawan yang masih terpusat di daerah Bali Selatan. Ekspor Barang juga diperkirakan tertahan akibat adanya ketidakpastian kebijakan tarif oleh Amerika Serikat yang akan

menghambat Ekspor ke Amerika Serikat yang memiliki pangsa 30,47% terhadap ekspor barang Bali.

LAPANGAN USAHA

Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 diperkirakan masih didominasi oleh kinerja LU terkait pariwisata, yaitu LU Transportasi, Akmamin, dan Perdagangan.

LU Akmamin diproyeksikan tetap tumbuh kuat seiring penyelenggaraan setidaknya 56 agenda dalam *Bali Calendar of Events* yang dirilis oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, mencakup festival seni budaya, olahraga, kuliner, dan MICE. LU Transportasi juga diperkirakan tetap solid, didukung peningkatan rute penerbangan domestik dan internasional langsung dari dan ke Bali melalui penambahan penerbangan pada jam *non-prime time*. Hingga November 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 38 rute internasional dan 20 rute domestik. Pasca revitalisasi, kapasitas bandara mampu menampung 32 juta penumpang per tahun, sementara realisasi 2025 tercatat sekitar 24,12 juta penumpang. Hal ini menunjukkan masih terbuka ruang peningkatan penerbangan langsung dari dan ke Bali. Pada 2026, kunjungan wisatawan mancanegara diperkirakan berada dalam rentang 7-7,5 juta, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar 6,95 juta. Kedatangan wisman yang masih tinggi juga didukung dengan potensi penambahan penerbangan langsung ke Bali, penguatan pengelolaan pariwisata berkualitas, termasuk diversifikasi tujuan Daya Tarik Wisata (DTW), pengelolaan sampah, dan peningkatan transportasi, yang menjaga daya saing pariwisata. Optimalisasi pemanfaatan dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA), termasuk alokasi sekitar Rp14 miliar untuk imbal jasa pemungutan pada 2026, diharapkan mendukung peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata.

LU Pertanian pada 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan pada LU Pertanian didukung membaiknya kondisi cuaca pada keseluruhan tahun 2026 dibanding tahun 2025 yang sempat terdampak La Nina lemah pada awal tahun. Peningkatan kinerja juga didorong oleh fokus program swasembada pangan melalui perluasan lahan tanam, kebijakan kemudahan perolehan pupuk subsidi,

dan penggunaan bibit unggul, serta berbagai program yang mendukung peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan. Kinerja subsektor peternakan turut meningkat untuk mendukung perluasan program MBG. Selain itu, produktivitas pertanian berpotensi terdorong dengan beroperasinya *Rice Milling Unit* (RMU) di Provinsi Bali dan rencana Pembangunan RMU modern di Tabanan yang diharapkan mampu menyerap dan mendorong produksi pertanian.

Sementara itu, LU Konstruksi pada 2026 diperkirakan menguat dibandingkan 2025. Pertumbuhan didorong oleh masih tingginya proyek konstruksi swasta seperti hotel, perkantoran, villa, dan fasilitas pendidikan. Berlanjutnya proyek strategis multitalun, termasuk pengembangan KEK Sanur, dan KEK Kura-Kura, serta penambahan proyek strategis seperti PSN PPN Pengembangan dan proyek pengolahan sampah menjadi energi, turut menopang ekspansi sektor konstruksi.

7.1.4. RISIKO PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi global pada 2026 diperkirakan tetap tumbuh di tengah meningkatnya ketidakpastian. Prospek ke depan masih dibayangi dampak lanjutan tarif resiproskal Amerika Serikat (AS), kerentanan rantai pasok global, serta eskalasi geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah. meskipun investasi di sektor teknologi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI), terus meningkat terutama di Amerika dan Asia, faktor-faktor eksternal tersebut berpotensi memengaruhi perekonomian Bali. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak hanya berisiko mengganggu rantai pasok, tetapi juga dapat memengaruhi arus wisatawan, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu *hub* penerbangan bagi wisatawan Eropa menuju Bali. Selain itu, perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai salah satu negara utama asal wisatawan mancanegara berpotensi menahan kinerja pariwisata Bali. Dari sisi domestik, relatif tingginya harga tiket penerbangan ke Bali berisiko menahan pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi RT berpotensi tertahan oleh meningkatnya sikap kehati-hatian (*precautionary motive*) masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Gangguan rantai pasok global berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor yang pada akhirnya dapat

menekan daya beli dan menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kolaborasi dan sinergi antara Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia mendorong implementasi lima strategi utama (Panca Kerthi), yaitu penguatan sektor padat karya, penguatan pariwisata berkualitas, pengendalian inflasi dan swasembada pangan, peningkatan pembiayaan dan investasi, digitalisasi Pemerintah Daerah dan ritel.

7.1.5. PRAKIRAAN INFLASI

Inflasi Provinsi Bali pada 2026 diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% dan lebih rendah dibandingkan 2025. Dari sisi inflasi inti, tekanan inflasi diperkirakan meningkat seiring tetap kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat dan wisatawan. Tingginya kunjungan wisatawan tidak hanya mendorong permintaan secara langsung, tetapi juga menopang pendapatan masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pariwisata, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan domestik ke depan. Dari sisi pasokan, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok global dan mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas seperti emas, biji kopi, biji kakao, dan minyak kelapa sawit (bahan baku minyak goreng dan produk turunan sabun). Sementara itu, inflasi *volatile food* diperkirakan lebih moderat seiring membaiknya kondisi cuaca (berakhirnya La Nina lemah), yang mendukung peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. Meski demikian, peningkatan permintaan pangan, termasuk dari implementasi penuh program MBG pada 2026, tetap perlu diantisipasi. Dari sisi inflasi *Administered Price*, kenaikan tarif parkir di Kabupaten Badung pada Januari 2026 diperkirakan menambah tekanan inflasi, meskipun dampaknya diperkirakan tertahan oleh penurunan harga BBM non-subsidi dan kebijakan diskon tarif angkutan udara pada momen HBKN.

Dinamika global juga turut memengaruhi prospek inflasi Provinsi Bali. Berdasarkan WEO Januari 2026, inflasi global diproyeksikan sebesar 3,8% (yoy) pada tahun 2026, lebih rendah dari prakiraan inflasi 2025 sebesar

4,1% (yoy). Proses disinflasi global diperkirakan akan terus berlanjut seiring melemahnya permintaan dan perlambatan pasar tenaga kerja global. Inflasi inti AS diproyeksikan akan mendekati target 2% seiring dengan dampak kenaikan tarif. Australia juga diproyeksikan akan mengalami persistensi inflasi di atas target dalam jangka waktu yang cukup lama. Sementara itu, di Jepang, inflasi diperkirakan akan moderat pada tahun 2026 dan mendekati target negara tersebut pada tahun 2027, seiring dengan penurunan harga pangan dan komoditas. Inflasi di Tiongkok diproyeksikan akan mulai naik dari level rendah, sedangkan inflasi di India diperkirakan akan kembali ke level mendekati target setelah penurunan yang signifikan pada tahun 2025 yang didorong oleh harga pangan yang rendah. Divergensi arah proyeksi inflasi di berbagai kawasan tersebut berpotensi berdampak pada semakin melebarnya perbedaan suku bunga kebijakan antara Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan negara lainnya yang berisiko meningkatkan ketidakpastian bagi negara berkembang dan menimbulkan fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar tersebut dapat mendorong risiko *imported inflation* di dalam negeri, terutama pada komoditas pangan yang masih bergantung pada impor seperti bawang putih, produk berbahan tepung terigu, minyak goreng, dan kopi bubuk. Selain pangan, pergerakan harga emas sebagai aset *safe haven* global yang mengalami penguatan di tengah ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan menjadi faktor eksternal lain yang turut memengaruhi dinamika inflasi di Provinsi Bali.

Dalam rangka menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, TPID Provinsi Bali bersama TPID kota/kabupaten di Bali terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif). Beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Intensifikasi operasi pasar murah dan pemantauan harga secara berkala menjelang HBKN. Pelaksanaan operasi pasar murah merupakan tindak lanjut/hasil *advisory* pada *High Level Meeting* HLM TPID dan Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Balinusra; (2) Pengawasan lapangan penyaluran beras SPHP dan koordinasi dengan Bulog dalam mendorong

pemanfaatan kios sebagai agen penyalur SPHP di Bali, serta pembukaan posko sembako; (3) Upaya memastikan ketersediaan pasokan melalui penandatanganan Kerjasama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) dimana salah satu fokus program prioritas adalah penguatan perdagangan dan ekspor antar provinsi; *linkage* antara Perumda dengan SPPG dan Perhotelan, penyaluran vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) untuk ternak; program asuransi usaha tani; bantuan alsintan; perbaikan irigasi; pengembangan bibit unggul serta pertanian organik; (4) Pengendalian ekspektasi inflasi diantaranya melalui Pelaksanaan HLM TPID-TP2DD Provinsi Bali yang berfokus pada perumusan strategi pengendalian inflasi 2026 dan HBKN Nyepi-Ramadan-Idulfitri pada tanggal 10 Februari 2026 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, perluasan informasi harga pangan di pasar tradisional melalui *running text* dan media sosial, pengaktifan gerai inflasi yang dikelola Perumda agar menjadi referensi harga pasar, serta diseminasi rutin upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi; serta (5) Penguatan data neraca pangan daerah, serta mendorong integrasi data nasional dan daerah. Melalui langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia optimis inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 terjaga pada rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy).



Administered Price (AP)

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

Akselerasi

Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/Kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Cash Inflows

Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.

Cash Outflows

Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.

Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ekspor

Keseluruhan barang dan atau jasa yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Faktor Fundamental

Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran-lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.

Faktor Non Fundamental

Faktor nonfundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (*volatile foods*), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (*administered price*).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank konvensional.

Impor

Seluruh barang dan atau jasa yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Imported inflation

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi inti

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental (merupakan Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *administered prices* dan *volatile food*).

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Kliring

Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kontraksi

Pertumbuhan yang negatif.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kualitas kredit

Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur, dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.

Melambat

Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.

mtm (month to month)

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Net Cashflows

Selisih bersih antara jumlah *cash inflows* dan *cash outflows* pada periode yang sama yang terdiri dari: *net cash outflows* bila *cash outflows* lebih tinggi dibandingkan dengan *cash inflows*, dan *net inflows* bila terjadi sebaliknya.

Non Performing Loan (NPL)

Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto merupakan Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. Terdiri atas PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Perusahaan

Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.

qtq (quarter to quarter)

Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Saldo Bersih

Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".

Sektor Ekonomi Dominan

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS)

Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendeбет maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulanan.

Survei Konsumen (SK)

Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.

yoy (year on year)

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Erwin Soeriadimadja

Penanggung Jawab

Ronald D. Parluhutan

Koordinator Penyusun

Muhamad Shiroth

Editor

Hero Wonida

Tim Penulis

Imma Nurma Sari

Suhardina Dwi Putrisari

Ayu Putu Arantza Bonita

Hafizhah Farah Azhar

Ikhlasul Amal Rianto

M. Rifhal Julian

Desainer

A.A. Gede Agung Maha Jaya

Supporting

A.A. Ayu Mas Radha Rani Dewi

Luh Putu Citra Kusuma

Kontributor

Tim Implementasi KEKDA

Tim Implementasi Kebijakan SP, Perizinan SP & Pelindungan Konsumen

Produksi dan Distribusi

Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah dan Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Grup Perumusan dan Implementasi KEKDA (Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah)

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988

Email : kpw Bali-kpkwp@bi.go.id

Website : www.bi.go.id



Download e-book



Google



LPP BI PROVINSI BALI



Ebook dapat diunduh melalui menu pencarian google atau pindai QR code atau tautan berikut:

bit.ly/LPP-BALI

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI

Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar - 90235

Telp : 62 - 361 - 248982, Fax : 61 - 361 - 34993 - 222988

Website : <https://www.bi.go.id>